

**PROGRAM EKONOMI MASYARAKAT PESISIR SEBAGAI  
UPAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PADANG  
DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
NELAYAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik*



*Oleh:*

**Ari Kurniawan**  
**05 193 051**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2010**



## ABSTRAK

**Ari Kurniawan (05193051), Program Studi Ilmu Administrasi, Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. Pembimbing I Drs. H. Rusdi Lubis, M.Si dan Pembimbing II Desna Aromatica, S.AP, M.AP. Judul Skripsi “ Program Ekonomi Masyarakat Pesisir Sebagai Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan”.**

Dinas kelautan dan Perikanan Kota Padang pada tahun 2008 dalam program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP), telah merealisasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program pemberdayaan masyarakat, yaitu fasilitasi tenaga pendamping desa (TPD), peningkatan sumber daya lembaga keuangan mikro, regenerasi nelayan, pemberdayaan perempuan pesisir dan publikasi program. Terkait dengan kegiatan tersebut untuk pemberdayaan masyarakat maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang sudah semestinya harus merespon kebutuhan masyarakat, yang dalam hal ini adalah masyarakat nelayan agar program pemberdayaan Masyarakat pesisir di kawasan pesisir pantai tersebut bisa langsung dirasakan terutama oleh nelayan.

Untuk melihat permasalahan ini peneliti berpedoman pada teori pemberdayaan sosial masyarakat nelayan Arif Satria, yang melihat bahwa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan ada beberapa prinsip penting yang digunakan untuk seluruh konteks komunitas nelayan yaitu: prinsip tujuan, prinsip pengetahuan dan penguatan nilai lokal, prinsip keberlanjutan, prinsip ketetapan kelompok sasaran, serta prinsip kesetaraan gender. Metode dan tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pemilihan informan secara *purposive sampling*.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pada kegiatan fasilitas tenaga pendamping prinsip yang berlaku disini adalah prinsip tujuan dimana nelayan dianggap sebagai subyek dalam pembangunan. Pada kegiatan peningkatan SDM LKM ini bisa, dikatakan Prinsip keberlanjutan menjadi pisau analisis yang kuat dalam melihat program ini. Dalam regenerasi nelayan ini prinsip tujuan sangat jelas mengakar dimana nelayan diikutsertakan langsung dengan mendapat berbagai pengarahan dan pelatihan. Peran serta lembaga agama/ adat ini sangat terkait dengan Prinsip pengetahuan dan penguatan nilai lokal. Dimana nelayan memiliki sistem pengetahuan dan nilai lokal yang cukup mengakar yang telah diwariskan secara turun temurun.

**Kata Kunci: Program, Pemberdayaan, Masyarakat Nelayan.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang masalah

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, dimana dua per tiga wilayahnya terdiri dari lautan. Kondisi ini menyediakan potensi sumber perikanan yang sangat besar. Sejak dulu nenek moyang telah mengenal manfaat laut, baik sebagai media perhubungan, pertahanan, pendidikan maupun sebagai sumber bahan pangan alam. Dengan keanekaragaman potensi laut Indonesia demi membangun masyarakatnya demi kesejahteraan sekarang dan di masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Wilayah laut Indonesia mencakup 12 mil ke arah garis pantai. Selain itu Indonesia memiliki wilayah yuridiksi nasional yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dan landas kontinen sampai sejauh 350 mil dari garis pantai. Wilayah Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati dan potensi perikanan laut merupakan asset yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Untuk itu otonomi daerahpun diperlukan agar Pemerintah pada masing-masing daerah bisa mengenali potensi laut tersebut dan memanfaatkannya guna menunjang pendapatan daerah tersebut.

---

<sup>1</sup> Harian Haluan Padang Sumatera Barat, Artikel *Potensi Kelautan Indoensia*, 4 April 2009, Hal. 5

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, adanya bentuk penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan memberdayakan daerah dengan segenap sumber daya yang dimiliki, maka oleh karena itu daerah memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam mengelola serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan tujuan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah merupakan sistem yang memungkinkan daerah untuk memiliki kemampuan mengoptimalkan potensi terbaik yang dimilikinya dan mendorong daerah untuk berkembang sesuai dengan karakteristik ekonomi geografis dan sosial budayanya

Pada Kota Padang sendiri, sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor yang menjanjikan, ini dilihat dari karakteristik ekonomi geografis Kota Padang didominasi oleh lautan. Potensi perikanan dan kelautan Kota Padang sangat besar, hanya saja masih kurang tereksplorasi. Potensi-potensi sumber daya alam daerah pesisir di Kota Padang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Estuaria (daerah pantai pertemuan antara air laut dan air tawar) berpotensi sebagai daerah penangkapan ikan (*fishinggrounds*) yang baik.
2. Hutan mangrove (ekosistem yang tingkat kesuburannya lebih tinggi dari Estuaria) untuk mendukung kelangsungan hidup biota laut.

3. Padang Lamun (tumbuhan berbunga yang beradaptasi pada kehidupan di lingkungan bahari) ; sebagai habitat utama ikan duyung, bulubabi, penyu hijau, ikan baronang, kakatua dan teripang.
4. Terumbu Karang (ekosistem yang tersusun dari beberapa jenis karang batu tempat hidupnya Beraneka ragam biota perairan).
5. Dan berbagai jenis ikan yang memiliki kualitas ekspor seperti ikan hias laut, ikan betutu, ikan cupang dan kepiting.<sup>2</sup>

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam memanfaatkan potensi sumber daya laut tersebut, karena potensi sumber daya laut tidak hanya menjadi salah satu dari pendapatan Kota Padang saja, tapi juga merupakan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan, dimana sebagian besar dari mereka menggunakan teknologi penangkapan ikan yang masih bersifat tradisional dan sebagian kecil memiliki alat penangkapan yang modern. Secara garis besar nelayan berdasarkan alat penangkapan ikan dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu :<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> [http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=4648&Itemid=1549](http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=4648&Itemid=1549), Di Akses Tanggal 20 Januari 2009

<sup>3</sup> Dirjen Kebudayaan Depdikbud, 1997, *Budaya Kerja Nelayan Indonesia di Jawa Timur*, CV Bupara Nugraha, Jakarta, Hal. 686

1. Nelayan berdasarkan pemilikan alat penangkapan, yang terbagi atas :
  - a. *Nelayan pemilik*, yaitu nelayan yang mempunyai alat penangkapan, baik yang langsung turun ke laut maupun yang langsung menyewakan alat tangkapan kepada orang lain.
  - b. *Nelayan Buruh atau nelayan penggarap*, yaitu nelayan yang tidak memiliki alat penangkap, tetapi mereka menyewa alat tangkap dari orang lain atau mereka yang menjadi buruh atau pekerja pada orang yang mempunyai alat penangkapan.
2. Berdasarkan sifat kerjanya nelayan, dapat dibedakan atas :
  - a. *Nelayan penuh atau nelayan asli*, yaitu nelayan baik yang mempunyai alat tangkap atau buruh yang berusaha semata-mata pada sektor perikanan tanpa memiliki usaha yang lain.
  - b. *Nelayan Sambilan*, yaitu nelayan yang memiliki alat penangkapan atau juga sebagai buruh pada saat tertentu melakukan kegiatan pada sektor perikanan disamping usaha lainnya.

Secara sosial budaya, dikemukakan bahwa masyarakat nelayan memiliki ciri-ciri yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Alasannya adalah pertama terdapat interaksi sosial yang intensif antara warga masyarakat, yang ditandai dengan efektifnya komunikasi tatap muka, sehingga terjadi hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian hal tersebut dapat membangun terjalinnya hubungan kekeluargaan yang didasarkan pada simpati dan bukan berdasarkan kepada pertimbangan rasional yang berorientasi kepada untung rugi.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Program Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Padang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat nelayan dan mengkorelasikanya dengan teori yang ada. Berdasarkan temuan data di lapangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat nelayan dideskripsikan berdasarkan aspek kebutuhan dalam teknologi alat tangkap, sistem kepercayaan, pembagian hasil ikan, pengaruh budaya lokal setempat terhadap usaha pemberdayaan masyarakat nelayan. Dimana pada setiap aspek menggambarkan bagaimana kondisi nelayan Di Kota Padang secara garis besar.

Terkait dengan tujuan penelitian ini sendiri mendeskripsikan Program Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Padang sebagai program pemberdayaan masyarakat nelayan maka pendeskripsianpun lebih tertuju pada program-program yang telah dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dalam Program Pemberdayaan Masyarakat nelayan dan mengkorelasikannya dengan teori yang menjadi pisau analisis pada penelitian ini seperti dibawah ini:

1. Pada kegiatan fasilitas tenaga pendamping prinsip yang berlaku disini adalah prinsip tujuan dimana nelayan dianggap sebagai subyek dalam pembangunan sehingga pendekatan yang digunakan adalah *to help them to help themself*.
2. Pada kegiatan peningkatan SDM LKM ini bisa dikatakan Prinsip keberlanjutan menjadi pisau analisis yang kuat dalam melihat program ini disebabkan prinsip keberlanjutan Sebagai suatu rekayasa sosial, pemberdayaan nelayan membutuhkan waktu yang relatif lama karena berkaitan dengan perubahan sosial yang bersifat struktural maupun kultural, juga tidak dipungkiri juga terdapat prinsip tujuan yang sangat kental disana, dimana nelayan diikutsertakan dalam peningkatan SDM LKM Pada prinsip keberlanjutan terlihat.
3. Dalam regenerasi nelayan ini prinsip tujuan sangat jelas mengakar dimana nelayan diikutsertakan langsung dengan mendapat berbagai pengarahan dan pelatihan, hal ini senada dengan esensi prinsip tujuan sendiri dimana nelayan harus dianggap sebagai subjek pembangunan. Prinsip ketetapan kelompok sasaran terlihat pada pemilihan generasi muda nelayan yang mempunyai jiwa enterpreuner dalam mengelola usaha kecil disamping nelayan

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Dirjen Kebudayaan Depdikbus.1997. *Budaya Kerja Nelayan Indonesia Di Jawa Timur*. Jakarta: CV Bupara Nugraha.
- Faisal, Sanafiah. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang : YA3
- Kusnadi. 2005. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta : LKIS
- Koentjaraningrat.1985. *Metode-metode Penelitian Kualitatif Masyarakat*, Jakarta
- Karsidi, Ravik. 2001.*Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Pambudy dan A.K.Adhy (ed.): Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani*, Bogor: Penerbit Pustaka Wirausaha Muda
- Mubyarto, Dkk. *Nelayan dan Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Agri Ekonomika
- Mulandar, Surya, 1996. *Dehumanisasi Anak Marginal, Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*. Bandung : Yayasan AKATIGA,
- Maleong, Lexy J.. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Malo, Manasse .1985. *Metode Penelitian Sosial Modul 1-5*. Jakarta: Kuranika,
- Nasution, Muslimin, *Pemberdayaan Masyarakat: Tujuan Proses Pengembangan Masyarakat Yang Dibangun Diatas Realita*. Bandung : ITB
- Nardin, M.Fadhil. 1990. *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Angkasa
- Nasution,S.1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Transiti.